

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BANTAENG



2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANTAENG**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BANTAENG



2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANTAENG**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2021

No. Publikasi : 7303.2120
Ukuran Buku : 15 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : ix + 38

Penanggung Jawab

Abdul Salam

Penyusun

Mushawwir Arman

Naskah

Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik - BPS Kabupaten Bantaeng

Gambar Kulit

Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik - BPS Kabupaten Bantaeng

Diterbitkan Oleh

Badan Pusat Statistik – Kabupaten Bantaeng

Dilarang Mengumumkan, Mendistribusikan, Mengomunikasikan, dan/atau Menggandakan Sebagian atau Seluruh isi Buku ini Untuk Tujuan Komersial Tanpa Izin Tertulis dari Badan Pusat Statistik.



KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantaeng yang disusun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan akan data yang berkaitan dengan indeks yang berfungsi sebagai ukuran pencapaian keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Bantaeng. Publikasi ini diharapkan juga menjadi bahan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Publikasi ini memuat berbagai indikator yang merupakan komponen IPM meliputi: indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks paritas daya beli. Data yang digunakan untuk menganalisis indeks tersebut adalah hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) di samping dari data sekunder yang berkaitan dengan pembangunan manusia yang bersumber dari instansi terkait.

Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memuaskan semua konsumen data sehingga saran yang konstruktif tetap diharapkan guna penyempurnaan publikasi berikutnya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga publikasi ini bisa terwujud, diucapkan terima kasih.

Bantaeng, Desember 2021

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANTAENG
KEPALA,

Drs. Abdul Salam, MM.

<https://bantaengkab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perkembangan Pengukuran Pembangunan Manusia.....	2
1.3. Tujuan Penulisan	3
1.4. Sumber Data	4
BAB II INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	5
2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	5
2.2. Angka Harapan Hidup (e_0)	7
2.3. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah	8
2.4. Purchasing Power Parity (PPP)	10
BAB III PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BANTAENG	11
3.1. Indeks Kesehatan.....	11
3.2. Indeks Pendidikan	12
3.3. Indeks Pengeluaran (Paritas Daya Beli).....	14
3.4. Indeks Pembangunan Manusia	15
BAB IV DIMENSI KESEHATAN.....	17
4.1. Umur Harapan Hidup (UHH)	17
4.2. Pemerataan Pelayanan Kesehatan	17
4.3. Status Kesehatan Masyarakat.....	18
BAB V DIMENSI PENDIDIKAN	20
5.1. Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	21
5.2. Tingkat Pendidikan.....	22
5.2.1. Rata–Rata Lama Sekolah	22
5.2.2. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	23
5.3. Angka Partisipasi Sekolah.....	24

BAB VI DIMENSI STANDAR HIDUP LAYAK	25
6.1. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan.....	25
6.2. Konsumsi Rumah Tangga	26
BAB VII STRATEGI PEMBANGUNAN MANUSIA.....	29
LAMPIRAN.....	31

<https://bantaengkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Nilai Maksimum dan Minimum Masing-Masing Indikator.....	6
Tabel 2. 2 Jenjang Pendidikan dan Skor yang Digunakan untuk Menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS).....	9
Tabel 4. 1 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng Tahun 2021	19
Tabel 5. 1 Rasio Murid terhadap Guru Di Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 dan 2020	21
Tabel 5. 2 Rasio Murid terhadap Sekolah di Kabupaten Bantaeng 2019 -2020	22
Tabel 5. 3 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Bantaeng Tahun 2021	23
Tabel 6. 1 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bantaeng Tahun 2016-2020 (persen)	27
Tabel 6. 2 Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bantaeng Tahun 2016-2020	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Indeks Kesehatan Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 - 2021.....	12
Gambar 3. 2 Indeks Pendidikan Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 - 2021	13
Gambar 3. 3 Indeks Pengeluaran Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 - 2021	14
Gambar 3. 4 IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.....	16
Gambar 5. 1 Rata-Rata Lama Sekolah di kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2021.....	23
Gambar 5. 2 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 – 2021	24
Gambar 6. 1 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 – 2021 (Ribuan Rupiah).....	26

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel. 1	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 – 2021 32
Tabel. 2	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021 33
Tabel. 3	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021 34
Tabel. 4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021 35
Tabel. 5	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun .2017 – 2021 36
Tabel. 6	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun .2017 – 2021 37
Tabel. 7	Peringkat IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun .2017 – 2021 38

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja (Todaro dan Smith). Pengalaman pada dekade tersebut menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduk. Pada tahun 1991 Bank Dunia menerbitkan laporan yang menegaskan bahwa tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan.

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multi dimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional. Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 (tiga) dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu *longevity*/umur panjang dan sehat yang diukur dengan angka harapan hidup (AHH) saat kelahiran, *knowledge*/pengetahuan diukur dengan angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS), serta *decent living standard*/standar hidup layak yang diukur dengan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*).

Secara umum, perkembangan IPM di Kabupaten Bantaeng periode 2017-2021 mengalami peningkatan. Dalam perkembangannya menunjukkan peningkatan capaian IPM seiring dengan membaiknya perekonomian daerah. Hal ini terjadi karena adanya perubahan satu atau lebih komponen IPM dalam periode tersebut. Perubahan yang dimaksud dapat berupa peningkatan atau penurunan besaran dari komponen-komponen IPM, yaitu angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita disesuaikan.

Saat ini pemerintah menunjukkan perhatian lebih terhadap isu pembangunan manusia. Secara berkala data IPM digunakan sebagai salah satu komponen dasar dalam penyusunan Dana

Alokasi Umum (DAU), selain jumlah penduduk, luas wilayah, produk domestik regional bruto perkapita dan indeks kemahalan konstruksi (IKK).

Modal manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu dalam rangka memicu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia (Aloysius, 2009). Menurut UNDP (*Human Development Report*, 1996) hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi bersifat timbal balik. Kinerja ekonomi memengaruhi pembangunan manusia melalui tingkat pendapatan, distribusi pendapatan dalam masyarakat, termasuk peran perempuan dan pemerintah. Sedangkan pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang baik sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber pertumbuhan ekonomi.

Kemajuan pada indikator sosial seperti pendidikan dan kesehatan sangat penting sebagai investasi untuk membangun manusia. Pendidikan dan kesehatan yang baik memungkinkan manusia untuk meningkatkan taraf hidupnya ke arah yang lebih baik.

1.2. Perkembangan Pengukuran Pembangunan Manusia

Laporan *Human Development Report* yang dipublikasikan UNDP pada tahun 1990 tidak hanya memuat konsep dan definisi dari pembangunan manusia tetapi juga bagaimana melakukan pengukuran pembangunan manusia. Konsep pengukuran pembangunan manusia yang dibuat oleh UNDP disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak tahun 1990 IPM dipublikasikan secara berkala oleh UNDP dalam laporan tahunan HDR. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam bentuk pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan aspek lain dalam kehidupan.

Pada HDR 1990 diperkenalkan tiga dimensi pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut diwakili dengan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto per kapita. Metode agregasi yang dilakukan untuk menghitung IPM menggunakan metode rata-rata aritmatik.

Metode agregasi IPM pun mengalami penyempurnaan, dari rata-rata aritmatik diubah menjadi rata-rata geometrik. Adapun metode agregasi untuk indeks Pendidikan berubah dari rata-

rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik. Penyempurnaan metodologi IPM pada tahun 2014 meliputi :

1. Mengganti tahun dasar PNB per kapita dari 2005 menjadi 2011;
2. Mengubah metode agregasi indeks Pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik.

Adapun indikator yang berubah, yaitu :

1. Angka Melek Huruf (AMH) pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
2. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita

Perubahan metode penghitungan IPM menghasilkan nilai IPM yang lebih sempurna dibanding IPM metode sebelumnya. Keunggulan IPM metode baru adalah karena menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan Rata-Rata Lama Sekolah dan angka Harapan Lama Sekolah bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam Pendidikan dan perubahan yang terjadi. Selain itu, PNB yang menggantikan PDB lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Sedangkan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan. Penambahan komoditas yang digunakan untuk menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan menghasilkan nilai yang lebih baik.

Keuntungan lainnya adalah dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam Menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

1.3. Tujuan Penulisan

Secara umum, publikasi ini akan menyajikan data dan analisisnya selama tahun 2017-2021. Data indeks pembangunan manusia dapat dilihat pada tabel lampiran. Untuk melihat perkembangannya juga digunakan data pada tahun sebelumnya. Selain itu, publikasi ini juga akan menganalisis perkembangan masing-masing komponennya. Secara khusus, publikasi ini bertujuan: menyajikan perkembangan IPM dengan metode terbaru menurut komponennya, menganalisis perkembangan indeks pembangunan manusia serta menyajikan analisis keterkaitan

IPM dengan indikator lainnya. Disamping itu, indeks pembangunan manusia Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 disusun dalam kerangka menempatkan dimensi manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan, sehingga diharapkan daerah mempunyai indikator yang berfungsi sebagai alat ukur dalam pencapaian pembangunan, terutama yang terkait erat dengan upaya peningkatan kualitas hidup manusia.

1.4. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor dan Modul Konsumsi. Sebagai penunjang data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Proyeksi Penduduk (SP 2010) dan Indeks Harga Konsumen (IHK). Data Susenas Kor digunakan untuk menghitung dua indikator pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Sementara Angka Harapan Hidup (e_0) dihitung menggunakan Data Susenas yang dikoreksi dengan Data Supas dan Proyeksi Penduduk. Sedangkan Indikator Daya Beli atau PPP (*purchasing Power Parity*) dihitung menggunakan Data Susenas Modul Konsumsi yang didasarkan pada 96 komoditi dimana 66 komoditi merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditi non makanan dengan menggunakan metode Rao.

BAB II

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Secara khusus, indeks pembangunan manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Dan dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan ke empat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak, dan untuk tahun ini IPM dihitung dengan menggunakan metode baru.

Sebagai ukuran kualitas hidup, indeks pembangunan manusia dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar antara lain: umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli. (*Purchasing Power Parity*).

United Nation Development Programme (UNDP) menyempurnakan metode penghitungan IPM dengan metode baru dan di Indonesia (BPS) baru menggunakan metode baru tersebut pada tahun 2015 untuk menyempurnakan perhitungan IPM agar hasilnya bisa lebih baik dan lebih menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

Alasan yang dijadikan dasar dalam perubahan metodologi penghitungan IPM adalah adanya beberapa indikator yang sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM seperti Angka Melek Huruf dianggap sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan, kemudian penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah disuatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian yang tinggi oleh dimensi lain sehingga dalam metode baru menggunakan rata-rata geometrik.

Untuk memudahkan dalam penghitungan dan analisa IPM diperlukan beberapa konsep dan definisi dari berbagai indikator yang digunakan sebagai berikut :

2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup (e_0), indeks pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Dimana: $I_{kesehatan}$: Indeks Kesehatan
 $I_{pendidikan}$: Indeks pendidikan
 $I_{pengeluaran}$: Indeks paritas daya beli

Dalam menghitung IPM, setiap komponen distandardisasi terlebih dahulu dengan nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator dengan menghitung rata-rata geometrik dari masing-masing indeks (Kesehatan, Pendidikan dan Pengeluaran). Berikut tabel minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator dan nilainya menurut UNDP dan BPS :

Tabel 2. 1 Nilai Maksimum dan Minimum Masing-Masing Indikator

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata lama sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan		100 (PPP U\$)	1.007.436 (Rp)	107.721 (PPP U\$)	26.572.352 (Rp)

Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia masih menggunakan rekomendasi UNDP dengan menggunakan ketiga komponen di atas, yaitu komponen kesehatan (longevity) yang terwakilkan dari usia harapan hidup (life expectancy at Age 0; e_0), komponen pengetahuan atau kecerdasan terwakilkan oleh dua buah indikator yaitu angka harapan lama Sekolah (literacy rate/Lit) dan rata-rata lama sekolah (Mean Years of Schooling/MYS) dan indikator hidup layak (decent living) atau kemakmuran yang terwakilkan oleh purchasing power parity/paritas daya beli. Untuk data PPP masih sulit didapatkan maka data yang digunakan adalah PDRB riil perkapita.

2.2. Angka Harapan Hidup (e_0)

Angka harapan hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Atau juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke x . Ukuran yang umum digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir (e_0) yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan angka harapan hidup, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir. Angka harapan hidup berhubungan erat dengan angka kematian bayi. Secara teoritis menurunnya angka kematian bayi, akan menyebabkan meningkatnya harapan hidup, juga merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tidak langsung (indirect estimation). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan angka harapan hidup yaitu anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH). Paket program *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup data ALH dan AMH. Selanjutnya dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan Negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004)

Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun.

Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk, khususnya di bidang kesehatan. Capaian angka harapan hidup di Kabupaten Bantaeng masih belum menggembirakan, dengan pertumbuhan angka harapan hidup hanya rata-rata sebesar 0,21 tahun selama tahun 2015-2019. Untuk itu perlu upaya

peningkatan kualitas kesehatan yang lebih komprehensif agar perbaikan derajat kesehatan yang direfleksikan melalui penurunan angka kematian bayi bisa diturunkan melalui perbaikan kondisi kesehatan ibu dan kondisi lingkungan yang sehat.

Penggunaan Angka Harapan Hidup didasarkan atas pertimbangan bahwa angka ini merupakan *resultante* dari berbagai indikator kesehatan. AHH merupakan cerminan dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, sanitasi lingkungan, pengetahuan ibu tentang kesehatan, gaya hidup masyarakat, pemenuhan gizi ibu dan bayi, dan lain-lain. Oleh karena itu AHH untuk sementara bisa mewakili indikator lama hidup.

2.3. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas dengan formula sebagai berikut :

$$IHLS = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

Dimana: I_{HLS} : Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)
 HLS : Harapan Lama Sekolah
 HLS_{maks} : Maksimum Harapan Lama Sekolah
 HLS_{min} : Minimum Harapan Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan formula sebagai berikut :

$$IRLS = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Dimana:

- IRLS : Indeks Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
 RLS : Rata-rata Lama Sekolah
 RLSmaks : Maksimum Rata-rata Lama Sekolah
 RLSmin : Minimum Rata-rata Lama Sekolah

Tabel 2. 2 Jenjang Pendidikan dan Skor yang Digunakan untuk Menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

Jenjang Pendidikan	Skor
(1)	(2)
Tidak punya	0
SD/MI/Sederajat	6
SLTP/MTs/Sederajat/Kejuruan	9
SMU/MA/Sederajat/Kejuruan	12
Diploma I/II	14
Diploma III/Sarjana Muda	15
Diploma IV/S1	16
S2	18
S3	21

Indeks pendidikan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

- Dimana: $I_{pendidikan}$: Indeks Pendidikan
 I_{HLS} : Angka Harapan Lama Sekolah
 I_{RLS} : Indeks Rata-rata Lama Sekolah

2.4. Purchasing Power Parity (PPP)

Komponen standar hidup layak atau dikenal juga sebagai *Purchasing Power Parity* (PPP) yang digunakan dalam laporan ini adalah PDRB riil perkapita yang telah disesuaikan (*adjusted real GRDP per capita*), seperti juga yang digunakan oleh UNDP. Berhubung PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan dengan menggunakan data Susenas.

Formula yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata pengeluaran penduduk, secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$I_{\text{Pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{Pengeluaran}) - \ln(\text{Pengeluaran})_{\min}}{\ln(\text{Pengeluaran})_{\max} - \ln(\text{Pengeluaran})_{\min}}$$

Dimana:

$\ln(\text{pengeluaran})$	= Logaritma Natural dari Pengeluaran
$\ln(\text{pengeluaran})_{\max}$	= Logaritma Natural dari Pengeluaran Maksimum
$\ln(\text{pengeluaran})_{\min}$	= Logaritma Natural dari Pengeluaran Minimum

BAB III

PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BANTAENG

Dalam era reformasi sekarang ini, otonomi daerah telah diterapkan secara menyeluruh sejak tahun 2001, sehingga roda pembangunan diharapkan lebih dekat dengan masyarakat, pelayanan lebih cepat, biaya lebih murah dan sesuai dengan kebutuhan riilnya. Untuk itu, tingkat keberhasilan pembangunan (kinerja) perlu diukur pada suatu daerah. Dalam pembahasan ini, kinerja pembangunan yang dimaksud adalah kinerja pembangunan manusia yang disajikan dalam satu indikator komposit (angka tunggal) yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam kerangka pembangunan manusia khususnya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta partisipasi dalam pembangunan. Namun indeks ini hanya akan memberikan gambaran perbandingan antar waktu dan perbandingan antar wilayah.

Sebelum pembahasan mengenai perbandingan IPM antar waktu, perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai keadaan dari masing-masing indikator (komponen) pembentuk IPM. Komponen-komponen tersebut adalah indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran.

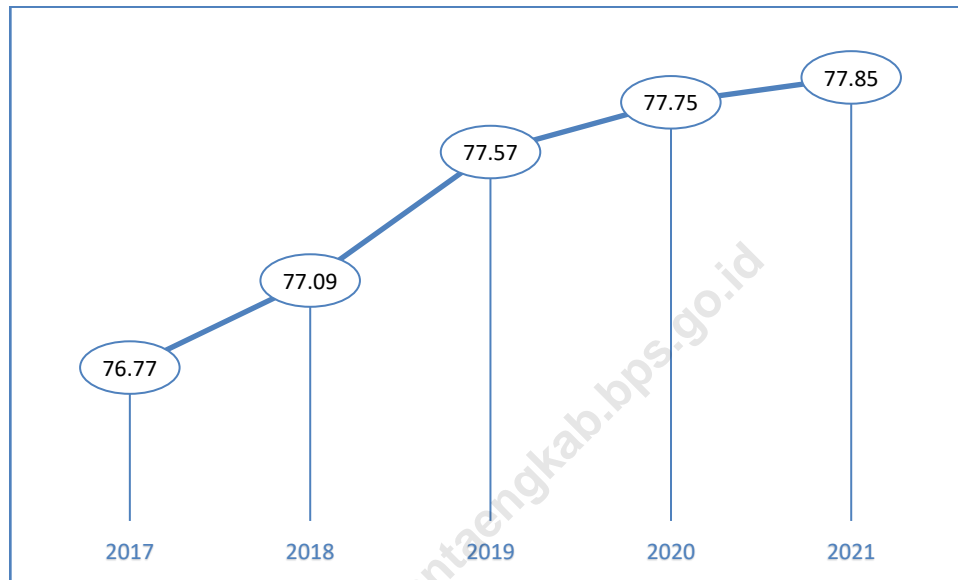
3.1. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan dalam hal ini adalah Umur Harapan Hidup (e_0) diharapkan dapat mencerminkan pembangunan manusia dibidang kesehatan. Dalam lima tahun terakhir perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) di kabupaten Bantaeng masing-masing pada tahun 2017 sebesar 69,90; tahun 2018 sebesar 70,12; tahun 2019 sebesar 70,42; tahun 2020 sebesar 70,54; dan di tahun 2021 naik menjadi sebesar 70,60. Perubahan indeks kesehatan relatif kecil, namun mempunyai arti yang sangat besar terhadap perubahan kondisi kesehatan masyarakat. Angka ini juga diartikan bahwa derajat kesehatan masyarakat telah berubah ke arah yang lebih baik dari tahun ke tahun. Selain itu pembangunan kesehatan baik yang dilakukan masyarakat, pemerintah maupun swasta telah menampakkan wujud nyata sebagai masyarakat yang mengerti betapa pentingnya arti kesehatan.

Perubahan indeks kesehatan Kabupaten Bantaeng mengalami kondisi peningkatan dari tahun ketahun selama lima tahun terakhir dengan indeks masing-masing pada tahun 2017 sebesar 76,77; tahun 2018 sebesar 77,09; tahun 2019 sebesar 77,57; tahun 2020 sebesar 77,75; dan di tahun 2021 menjadi 77,85.

Kondisi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk kabupaten Bantaeng ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap indeks Kesehatan di kabupaten Bantaeng, dimana di tahun 2020 dan 2021 masih tercatat mengalami kenaikan.

Gambar 3. 1 Indeks Kesehatan Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 - 2021



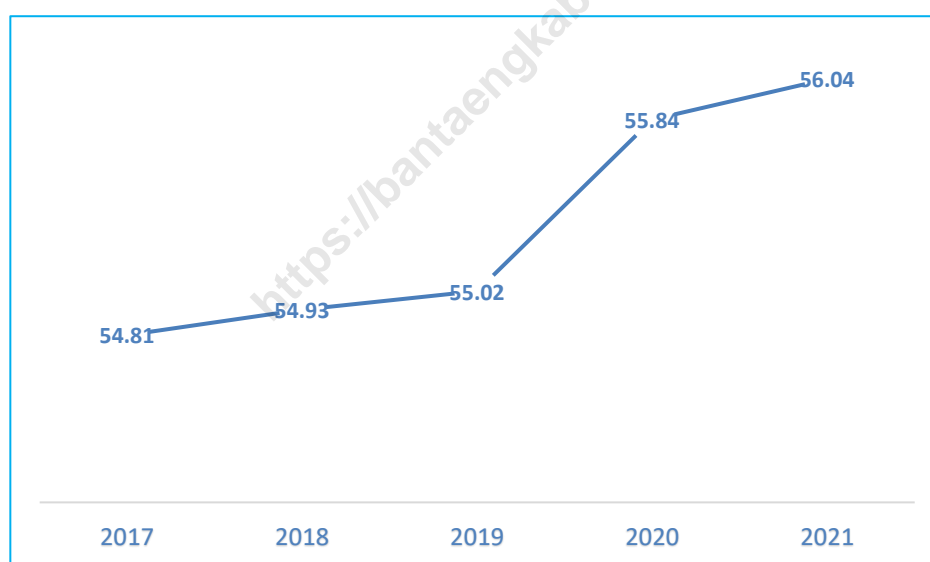
3.2. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan gabungan dari dua indikator pendidikan yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Pada umumnya Indeks Pendidikan di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan mengalami peningkatan, termasuk Kabupaten Bantaeng. Hal ini dapat dilihat dari angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada pada tahun 2017 sebesar 6,45; pada tahun 2018 sebesar 6,47; tahun 2019 sebesar 6,48; tahun 2020 sebesar 6,72; dan di tahun 2021 sebesar 6,77. Meskipun menunjukkan tren positif setiap tahunnya, namun rata-rata lama sekolah selama lima tahun terakhir di kabupaten Bantaeng menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas masih di tingkat tamatan SD sederajat, dimana angka RLS tersebut belum menyentuh angka 7 yang mewakili tingkat Pendidikan kelas 1 SMP sederajat.

Sementara itu, Angka Harapan Lama Sekolah juga mengalami trend peningkatan positif tiap tahunnya selama lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2017 sebesar 11,99; tahun 2018 sebesar 12,01; tahun 2019 sebesar 12,03; tahun 2020 sebesar 12,04; dan di tahun 2021 sebesar 12,05. Angka HLS ini menunjukkan bahwa penduduk pada usia 7 tahun diharapkan menikmati lama sekolah sekitar 12 tahun, yaitu mewakili pendidikan tingkat tamatan SMA sederajat.

Dimensi pengetahuan merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah yang terinterpretasi melalui indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan Kabupaten Bantaeng pada 2017 sebesar 54,8; pada tahun 2018 sebesar 54,93; pada tahun 2019 sebesar 55,02; tahun 2020 sebesar 55,84; dan di tahun 2021 sebesar 56,04. Dari indeks Pendidikan ini dapat dilihat adanya tren peningkatan tiap tahun tapi masih perlu mendapat perhatian karena pertumbuhan yang ditunjukkan masih cukup rendah.

Gambar 3. 2 Indeks Pendidikan Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 - 2021



Program bantuan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah beberapa tahun terakhir belum berdampak secara langsung pada Indeks Pendidikan. Hal ini dikarenakan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk menunjukkan hasil yang maksimal karena penerima manfaat dari program pemerintah masih berusia di bawah 25 tahun. Sehingga jika kita lihat dari dua indikator Pendidikan, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sudah menunjukkan bahwa harapan pendidikan usia 7 tahun ke atas sudah mencapai rata-rata 12 tahun atau setingkat dengan tamat SMA sederajat.

Adapun untuk angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih membutuhkan waktu lebih lama untuk memperlihatkan hasil yang maksimal.

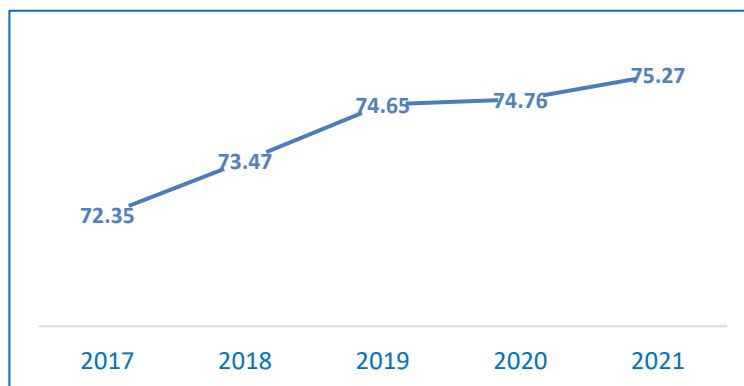
3.3. Indeks Pengeluaran (Paritas Daya Beli)

Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat antar satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda. Perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah masih belum bisa dibandingkan, untuk itu perlu dibuat standarisasi. Misalnya, satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di daerah lainnya.

Komponen Paritas daya beli atau *Purchasing Power Parity (PPP)* atau kemampuan daya beli/standar hidup layak, dalam laporan ini diolah berdasarkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Penghitungan paritas daya beli menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan.

Daya beli penduduk Kabupaten Bantaeng pada tahun 2017 – 2021 (ribu rupiah) mengalami tren peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 sebesar Rp. 10.751,- dan pada tahun 2021 meningkat mencapai Rp. 11.829,-. Meningkatnya daya beli masyarakat ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Bantaeng semakin membaik.

Gambar 3. 3 Indeks Pengeluaran Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 - 2021



3.4. Indeks Pembangunan Manusia

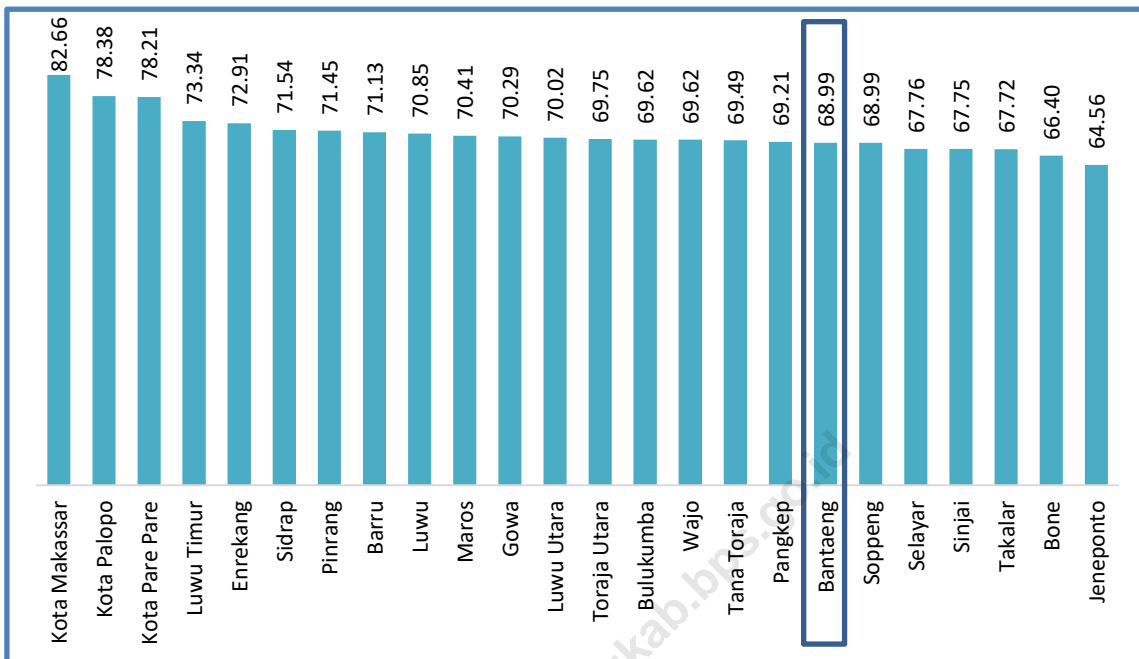
Manusia adalah kekayaan yang sesungguhnya, pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP), tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Perbandingan indikator (komponen IPM yang diuraikan pada subbab sebelumnya) merupakan tinjauan parsial, artinya tingkat keberhasilan pembangunan baru di ukur dari satu komponen saja. Akan tetapi dengan adanya indikator tunggal IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan suatu jawaban untuk menilai kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Indikator ini juga secara mudah dapat memberikan posisi kinerja pembangunan (output pembangunan) yang dicapai oleh suatu daerah. Makin tinggi nilai IPM suatu daerah, semakin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantaeng sejalan dengan beberapa indeks lainnya dimana nilai IPM Kabupaten Bantaeng terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir dengan besaran masing-masing pada tahun 2017 sebesar 67,27; tahun 2018 sebesar 67,76; tahun 2019 sebesar 68,30; tahun 2020 sebesar 68,73; dan di tahun 2021 naik sebesar 68,99. Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantaeng jika dibandingkan dengan 23 kabupaten/kota lainnya maka Kabupaten Bantaeng menempati urutan ke 18 dari 24 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2021 seluruh indikator penyusun IPM di Kabupaten Bantaeng mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan IPM sendiri tercatat mengalami kenaikan sebesar 0,38 persen.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantaeng kedepannya masih berpeluang mengalami pertumbuhan positif yang cukup signifikan karena program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah utamanya di sektor Pendidikan beberapa tahun terakhir baru dapat dilihat hasilnya beberapa tahun kemudian. Angka Usia Harapan Hidup (UHH) dan pengeluaran per kapita disesuaikan (PPP) sudah menunjukkan hasil yang baik dan masih bisa ditingkatkan kedepannya.

Gambar 3. 4 IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021



Berdasarkan klasifikasi UNDP nilai IPM dibagi menjadi tiga kategori masing-masing kurang dari 60 dikategorikan sebagai IPM rendah, nilai IPM antara 61 sampai dengan 69 dikategorikan sebagai IPM sedang, nilai IPM di atas 71 sampai dengan 79 dikategorikan tinggi dan capaian IPM 80 keatas dikategorikan sebagai IPM yang sangat tinggi. Dengan demikian jika berdasarkan kategori UNDP, maka IPM Kabupaten Bantaeng tergolong dalam kategori IPM yang sedang dalam kurung waktu lima tahun terakhir (2017 – 2021).

BAB IV

DIMENSI KESEHATAN

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang baik. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, antara lain dengan memberikan penyuluhan agar keluarga membiasakan diri untuk hidup sehat dan menyediakan beberapa fasilitas kesehatan sampai ke daerah-daerah terpencil.

4.1. Umur Harapan Hidup (UHH)

Salah satu indikator kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan adalah umur harapan hidup (UHH). UHH atau e_0 didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH Kabupaten Bantaeng pada tahun 2020 sebesar 70,54 dan pada tahun 2021 sebesar 70,60 atau menguat sebesar 0,06 poin. Dengan kata lain, rata-rata lama hidup penduduk kabupaten Bantaeng pada tahun 2021 mencapai 70 tahun. Sedangkan UHH Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 sebesar 70,57 dan tahun 2021 sebesar 70,66.

Besar kecilnya UHH dipengaruhi oleh banyaknya variabel yang bersifat endogen (kondisi bawaan) maupun eksogen (pengaruh dari luar). Variabel eksogen sangat luas cakupannya, meliputi input makanan, upaya kesehatan dan kondisi lingkungan yang juga dipengaruhi oleh variabel lainnya. Pengaruh variabel-variabel tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, dapat seketika maupun dengan tenggang waktu (*time lag*) tertentu. Pengaruh variabel tersebut bekerja secara tersendiri maupun bersinergi dengan variabel lain.

Sementara itu, masih terdapat beberapa variabel yang diperkirakan berpengaruh terhadap UHH. Secara umum diharapkan bahwa dengan semakin tingginya persentase balita yang ditolong kelahirannya oleh tenaga medis akan semakin tinggi kemungkinan kelangsungan hidupnya. Tetapi perkiraan hubungan tersebut dapat menyimpang jika pertolongan tenaga medis digunakan untuk proses kelahiran yang abnormal dan dengan penanganan yang sudah terlambat.

4.2. Pemerataan Pelayanan Kesehatan

Fasilitas dan tenaga kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan dan penanggulangan kesehatan masyarakat. Fasilitas yang tersedia tanpa didukung

dengan tenaga yang mengerti di bidangnya tentunya akan kurang bermakna, begitu juga sebaliknya tenaga yang tersedia tanpa fasilitas yang memadai akan mendapatkan hasil yang kurang optimal.

Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan sampai daerah terpencil, sehingga mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat termasuk yang tidak mampu sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit berada di ibukota kabupaten/kota sedangkan untuk melayani masyarakat di pedesaan biasanya tersedia fasilitas pelayanan kesehatan berupa puskesmas. Puskesmas adalah satu unit pelayanan fungsional yang fungsi utamanya adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama. Wilayah kerjanya meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan, yang biasanya dibangun dengan melihat kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografi dan infrastruktur lainnya.

Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Kabupaten Bantaeng, maka sampai pada tahun 2020 telah tersedia 2 Rumah Sakit Umum yang berada di kecamatan Bantaeng, juga didukung 13 puskesmas, 21 puskesmas pembantu, 8 Klinik Kesehatan; 35 Praktik Dokter 14 apotek, serta 9 Apotik yang tersebar di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantaeng.

Pada tahun 2020 jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Bantaeng sebanyak 26 orang dokter, 53 orang perawat, 65 orang bidan, dan 19 orang farmasi. Semua tenaga kesehatan tersebut bekerja pada sarana pelayanan kesehatan yang tersebar di Kabupaten Bantaeng.

4.3. Status Kesehatan Masyarakat

Data Susenas menunjukkan bahwa persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di Kabupaten Bantaeng sekitar 12,91 persen dari total penduduk pada tahun 2021, dimana laki-laki yang mengalami keluhan sebanyak 13,06 persen dan perempuan sebanyak 12,77 persen. Banyaknya penduduk yang mengalami gangguan kesehatan diduga sebagai akibat perubahan cuaca yang semakin tidak menentu. Apabila dilihat dari jenis kelamin, maka persentase perempuan yang mengeluh lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

Tabel 4.1 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng Tahun 2021

		Apakah mempunyai keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari?		Total
		Ya	Tidak	
		Jenis kelamin	Laki-laki	
	Perempuan	12.77	87.23	100.00
Distribusi pengeluaran per kapita sebulan	40% bawah	9.29	90.71	100.00
	40% menengah	16.13	83.87	100.00
	20% atas	13.76	86.24	100.00
Total		12.91	87.09	100.00

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), maka morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Dari Tabel 4.1, dapat dilihat angka kesakitan Laki-Laki pada tahun 2021 sebesar 13,06; sedangkan angka kesakitan perempuan lebih rendah yaitu 12,77. Artinya, gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya di Kabupaten Bantaeng lebih banyak dialami oleh Laki-Laki.

BAB V

DIMENSI PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran, Setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, gender dan lokasi geografis.

Pemenuhan hak atas pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus sebagai investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

UUD 1945 Pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Demikian pula dalam UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) pasal 5, ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat).

Dalam RPJMN 2020 – 2024, Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Dari arahan presiden tersebut diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, antara lain :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Masing-masing agenda mempunyai langkah-langkah yang berbeda. Agenda pembangunan ketiga yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, memerlukan beberapa langkah salah satunya adalah peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.

5.1. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Ketersediaan fasilitas pendidikan sangat menunjang peningkatan kualitas pendidikan. Fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar merupakan dua hal yang sangat berperan penting terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu hal yang selama ini masih menjadi kendala adalah kelangkaan jumlah guru di daerah terpencil. Isu yang sering terdengar, banyaknya tenaga pendidik yang enggan ditempatkan pada daerah terpencil, hal ini mengakibatkan menumpuknya jumlah guru di daerah perkotaan. Sebaran tenaga pendidik di daerah dapat dilihat perbandingan antara jumlah murid dan guru dengan tingkat pendidikan. Semakin kecil rasionya, maka beban guru semakin kecil pula.

Tabel 5. 1 Rasio Murid terhadap Guru Di Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 dan 2020

Tingkat Pendidikan	2019/2020	2020/2021
(1)	(2)	(3)
SD/MI		
Jumlah Murid	21.282	20.823
Jumlah Guru	2.588	1.467
Rasio Murid Guru	8,22	14,19
SLTP/MTsN		
Jumlah Murid	10.716	5.877
Jumlah Guru	1.149	976
Rasio Murid Guru	9,32	6,02
SLTA/Sederajat		
Jumlah Murid	8.936	9.124
Jumlah Guru	889	932
Rasio Murid Guru	10,05	9,79

Sumber: Dinas Pendidikan Kab.Bantaeng

Jika diperhatikan rasio murid terhadap guru pada semua jenjang pendidikan bervariasi, ada yang dari tahun sebelumnya naik dan ada yang dari tahun sebelumnya mengalami penurunan. Pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah rasio murid terhadap gurunya sebesar 8,22 pada tahun 2019/2020 naik menjadi 14,19 pada tahun 2020/2021, pada tingkat Sekolah Menengah Pertama dan sederajat dari rasio sebesar 9,32 pada tahun 2019/2020 turun menjadi 6,02 pada tahun 2020/2021. Sedangkan pada tingkat sekolah menengah atas dan sederajat dari rasio sebesar 10,05 pada tahun 2019/2020 turun menjadi 9,79 pada tahun 2020/2021. Rasio Murid terhadap guru sebagai acuan untuk melihat efektivitas guru

dalam memberikan pengajaran jika rasionya lebih besar maka seorang guru akan lebih susah melakukan pengawasan dan penguasaan dalam kelas.

Demikian halnya dengan rasio murid terhadap sekolah relatif berubah selama dua tahun terakhir, dimana untuk tingkat Sekolah Dasar dan sederajat rasio murid terhadap sekolah pada tahun ajaran 2019/2020 sebesar 124,46 menjadi 122,49 pada tahun ajaran 2020/2021, pada tingkat Sekolah Menengah Pertama dan sederajat rasio murid terhadap sekolah sebesar 142,88 pada tahun ajaran 2019/2020 turun menjadi hanya 78,36 pada tahun ajaran 2020/2021 dan pada tingkat Sekolah Menengah Atas dan sederajat rasio murid terhadap sekolah sebesar 207,81 pada tahun ajaran 2019/2020 naik menjadi 212,19 pada tahun ajaran 2020/2021.

Tabel 5. 2 Rasio Murid terhadap Sekolah di Kabupaten Bantaeng 2019 -2020

Rata-rata banyaknya murid bersekolah pada setiap tingkat pendidikan dapat diketahui dengan membandingkan jumlah murid terhadap sekolah. Dari angka rasio murid terhadap sekolah dapat dijadikan oleh Pemerintah maupun Swasta untuk menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan sekolah pada suatu daerah.

Tingkat Pendidikan	2019/2020	2020/2021
(1)	(2)	(3)
SD/MI		
Jumlah Murid	21.282	20.823
Jumlah Sekolah	171	170
Rasio Murid Sekolah	124,46	122,49
SLTP/MTsN		
Jumlah Murid	10.716	5.877
Jumlah Sekolah	75	75
Rasio Murid Sekolah	142,88	78,36
SLTA/Sederajat		
Jumlah Murid	8.936	9.124
Jumlah Sekolah	43	43
Rasio Murid Sekolah	207,81	212,19

5.2. Tingkat Pendidikan

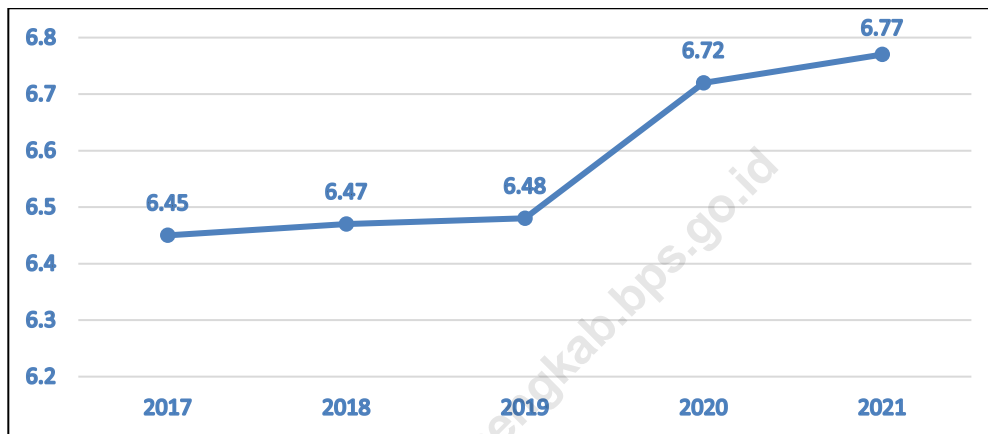
Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan seseorang dalam meningkatkan kualitas hidup termasuk dalam lapangan pekerjaan, pendidikan sangat berpengaruh terhadap jenis pekerjaan yang ditawarkan perusahaan. Pekerjaan yang baik akan membutuhkan pekerja yang berpendidikan yang tinggi .

5.2.1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lamanya sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan Formal. Cakupan penduduk yang dihitung sesuai metode baru yaitu rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun keatas.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2017 sebesar 6,45; pada tahun 2018 sebesar 6,47; tahun 2019 sebesar 6,48; tahun 2020 sebesar 6,72; dan di tahun 2021 sebesar 6,77. Hal ini menunjukkan penduduk kabupaten Bantaeng usia 25 tahun ke atas masih dikisaran tingkat pendidikan tamat SD atau sederajat, dimana angka RLS tersebut belum menyentuh angka 7 yang mewakili tingkat pendidikan kelas 1 SMP atau sederajat.

Gambar 5. 1 Rata-Rata Lama Sekolah di kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2021



Tabel 5. 3 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Bantaeng Tahun 2021

Tingkat Pendidikan	2021
(1)	(2)
Tidak punya ijazah	32,26
SD/Sederajat	22,39
SMP/Sederajat	16,88
SMA/ Sederajat ke atas	28,48

Sumber: Susenas 2021

5.2.2. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Potensi sumber daya manusia di suatu daerah dapat dilihat dari jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk. Berdasarkan data hasil Susenas tahun 2021, penduduk Kabupaten Bantaeng umur 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah sekitar 32,26 persen, tamat

SD/Sederajat sekitar 22,39 persen, SMP/Sederajat sekitar 16,88 persen, SMA/Sederajat ke atas sekitar 28,48 persen. Melihat tingginya persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang tidak

memiliki ijazah, menunjukkan perlunya perhatian khusus dari berbagai pihak terhadap pendidikan di kabupaten Bantaeng yang masih tergolong rendah.

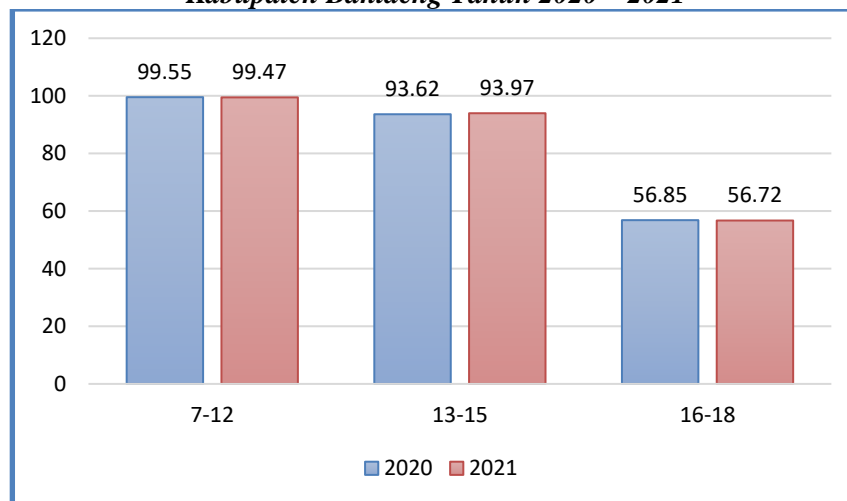
5.3. Angka Partisipasi Sekolah

Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat selalu berkaitan dengan berhasil tidaknya upaya pembangunan yang ingin dicapai. Pendidikan adalah upaya yang strategis untuk merambah jalan menuju tujuan pembangunan. Untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam sektor pendidikan salah satunya bisa dilihat dari angka partisipasi sekolah suatu masyarakat pada daerah tersebut.

Angka partisipasi sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun meningkatnya angka partisipasi sekolah tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Angka partisipasi sekolah untuk usia sekolah dasar di Kabupaten Bantaeng cenderung turun antara kurun waktu 2020-2021. Pada tahun 2020 APS penduduk usia sekolah 7-12 tahun sekitar 99,55 persen menjadi 99,47 persen pada tahun 2021 atau turun sekitar 0,08 persen, APS penduduk usia sekolah 13-15 tahun pada tahun 2020 sebesar 93,62 persen naik sekitar 0,35 persen pada tahun 2021 menjadi 93,97 persen, kelompok penduduk usia sekolah 16-18 tahun dari 56,85 persen pada tahun 2020 turun sekitar 0,13 persen pada tahun 2021 menjadi 56,72 persen.

Gambar 5. 2 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 – 2021



BAB VI

DIMENSI STANDAR HIDUP LAYAK

Dimensi standar hidup layak dicerminkan oleh indikator pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan. Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran perkapita ini dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.

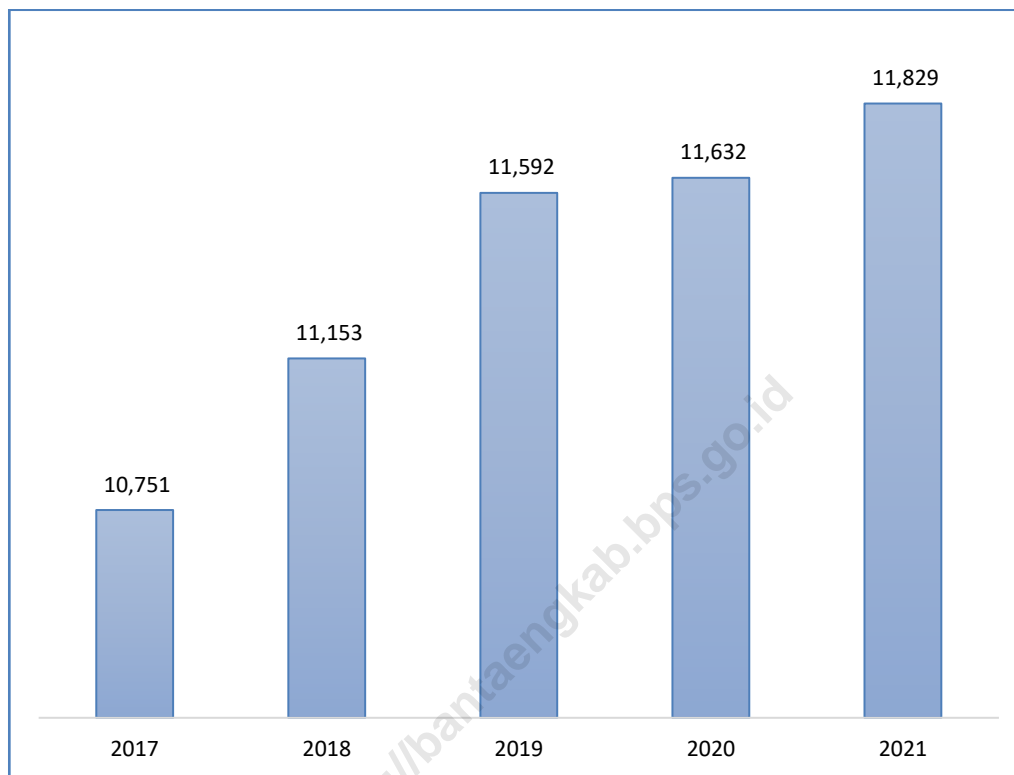
Penghitungan paritas daya beli pada IPM metode baru ini menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Batas minimum pengeluaran per kapita disesuaikan merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten pada tahun 2010. Angka tersebut merupakan garis kemiskinan Kabupaten Tolikara Provinsi Papua pada tahun 2010. Sedangkan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2015 (akhir RPJPN), yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

6.1. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Tren Pengeluaran per kapita disesuaikan di kabupaten Bantaeng selama periode 2017-2021 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 tercatat pengeluaran per kapita disesuaikan sebesar 10.751, kemudian pada tahun 2018 sebesar 10.331, pada tahun 2019 tercatat sebesar 10.480, pada tahun 2020 sebesar 11.632, dan pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 11.829. Jika diperhatikan, selama 5 tahun terakhir pengeluaran per kapita kabupaten Bantaeng tidak pernah mengalami penurunan dan bahkan mengalami pertumbuhan sebesar 10,03 persen.

Pada tahun 2020 dan 2021 perekonomian kabupaten Bantaeng ikut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19 dengan adanya berbagai pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk menekan penularan virus Covid-19. Namun pada tahun 2020 pengeluaran per kapita disesuaikan kabupaten Bantaeng masih tercatat tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,35 persen. Dan pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif lebih tinggi sebesar 1,69 persen, hal ini disebabkan mulai adanya pelonggaran terhadap pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dibandingkan dengan pembatasan di tahun 2020. Bantuan sosial yang digulirkan pemerintah untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak pembatasan sosial cukup memberikan pengaruh yang signifikan terhadap daya beli masyarakat kabupaten Bantaeng.

Gambar 6.1 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 – 2021 (Ribu Rupiah)



6.2. Konsumsi Rumah Tangga

Tingkat konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk mengukur daya beli masyarakat dan berperan dalam fluktuasi kegiatan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan termasuk kabupaten Bantaeng masih dipengaruhi oleh besarnya konsumsi rumah tangga. Berdasarkan Tabel 6.1, selama lima tahun terakhir peran konsumsi rumah tangga di kabupaten Bantaeng selalu di atas 50 persen terhadap perekonomian kabupaten Bantaeng kemudian diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto dan konsumsi pemerintah. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Bantaeng maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga.

**Tabel 6. 1 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bantaeng
Tahun 2016-2020 (persen)**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	56,81	56,34	55,33	53,72	54,59
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,68	1,67	1,73	2,01	2,03
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13,06	12,61	12,71	13,02	12,69
Pembentukan Modal Tetap Bruto	47,61	50,14	51,28	50,84	52,23
Perubahan Inventori	1,28	0,26	0,22	0,26	0,30
Net Ekspor	- 20,45	-21,02	-21,27	-19,68	-21,83
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : *Angka sementara

**Angka sangat sementara

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Meskipun peran konsumsi rumah tangga terhadap perekonomian mengalami tren penurunan, namun nilainya mengalami kenaikan setiap tahunnya baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Perkembangan komponen konsumsi rumah tangga pada PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bantaeng Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6. 2 Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bantaeng Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga/Total of Household Consumption					
a. ADHB / Current Prices (Miliar Rp/Trillion Rp)	3.577,68	3.911,09	4.298,64	4.717,45	4.896,86
b. ADHK 2010/2010 Constant Prices (Miliar Rp/Trillion Rp)	2.465,96	2.581,94	2.720,39	2.920,25	2.948,08
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB / Current Prices (Ribu Rp/Thousand Rp)	78.987,88	85.854,17	93.840,43	102.426,36	105.995,00
b. ADHK 2010/2010 Constant Prices (Ribu Rp/Thousand Rp)	54.443,42	56.677,53	59.386,81	63.405,16	63.812,65
Rata-rata konsumsi per-Kapita/ Average of per-capita consumption (Ribu Rp/Thousand Rp)					
a. ADHB / Current Prices (Ribu Rp/Thousand Rp)	19.389,42	21.074,82	23.035,19	25.142,84	25.978,74
b. ADHK 2010/2010 Constant Prices (Ribu Rp/Thousand Rp)	13.364,41	13.912,77	14.577,79	15.564,22	15.640,10
Pertumbuhan/Growth					
a. Total konsumsi RT/ Total of Household Consumption	5,71	4,70	5,36	7,35	0,95
b. Per-RT	5,06	4,10	4,78	6,77	0,64
c. Perkapita/Per capita	5,06	4,10	4,78	6,77	0,49
Jumlah penduduk/Number of population (000 orang/person)	184,517	185,581	186,612	187,626	188.495

Catatan : *Angka sementara

**Angka sangat sementara

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Menurut harga berlaku pada tahun 2016, setiap rumah tangga di Kabupaten Bantaeng menghabiskan dana sekitar 78,99 juta rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat hingga pada tahun 2020 menjadi 105,99 juta rupiah.

BAB VII

STRATEGI PEMBANGUNAN MANUSIA

Sebagai salah satu variabel kebutuhan fiskal pada penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU), sudah barang tentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mendapatkan perhatian khusus pada suatu wilayah. Berbagai strategi bisa diterapkan oleh Pemerintah agar hasil penghitungan masing-masing dimensi IPM dapat memberikan hasil yang memuaskan. Strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pembangunan manusia, antara lain :

1. Usaha peningkatan kemampuan dasar sumber daya manusia dalam bidang kesehatan di antaranya melalui pemerataan pelayanan kesehatan, peningkatan status gizi terutama balita dan peningkatan peran serta masyarakat.
 - a. Pemerataan pelayanan kesehatan diantaranya melalui :
 - Penambahan dan perbaikan sarana pelayanan kesehatan
 - Penambahan tenaga medis dan paramedis
 - Penyediaan obat-obatan yang harganya terjangkau oleh masyarakat
 - b. Peningkatan Status Gizi
 - Pemberian kapsul zat gizi terutama bagi ibu hamil dan balita.
 - Pemberian makanan tambahan untuk bumil dan balita lebih diintensifkan/diperluas.
 - c. Peningkatan peran serta masyarakat
 - Melakukan intervensi kepemimpinan yang berwawasan kesehatan untuk semua,
 - Melakukan intervensi kesehatan pada setiap kelompok masyarakat sehingga muncul usaha kesehatan bersama masyarakat,
 - Memanfaatkan sumber dana yang ada pada masyarakat untuk membiayai kegiatan bidang kesehatan.

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah perlu melakukan berbagai program baik yang sifatnya promotif, preventif maupun kuratif antara lain melalui pendidikan kesehatan, imunisasi, pemberantasan penyakit menular, penyediaan air bersih dan sanitasi, dan pelayanan kesehatan.

2. Usaha Bidang Pendidikan melalui :
 - a. Peningkatan angka melek huruf dengan upaya pemberantasan buta aksara melalui kejar paket A yang ditindaklanjuti dengan pembentukan kelompok pembaca dan penyediaan perpustakaan keliling. Dengan demikian angka melek huruf di kabupaten ini yang masih rendah dapat meningkat pada waktu yang akan datang.

- b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Untuk anak usia sekolah yang sudah bekerja membantu perekonomian rumahtangga, hendaknya waktu bekerja diatur sedemikian rupa tanpa mengganggu waktu belajar.
 - c. Persoalan pendidikan yang lain adalah penduduk putus sekolah, yang diduga sebagian besar berasal dari keluarga tidak mampu, apalagi setelah bangsa kita dilanda krisis ekonomi. Oleh karena itu pemerintah perlu berupaya mengatasinya melalui berbagai program, baik program penyelamatan yang bersifat subsidi langsung maupun program pemulihan yang lebih ditujukan kepada penataan sistem pendidikan serta pemberdayaan keluarga dalam kaitannya dengan pendidikan anak, contohnya dengan menggalakkan gerakan pendidikan paket B dan C.
 - d. Selain pengembangan sistem pendidikan formal, maka kebijakan perlu pula ditujukan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan pendidikan non formal. Kebijakan ini ditujukan untuk kelompok penduduk yang karena pertimbangan usia maupun alasan lainnya, tidak dapat ikut dalam sistem pendidikan formal. Dengan kebijakan pendidikan non formal ini maka diharapkan terjadi peningkatan kemampuan dasar di kalangan penduduk, terutama mereka yang berlatar belakang pendidikan formal rendah atau tidak ada sama sekali. Kemampuan tersebut mencakup membaca/menulis, pengetahuan umum, serta keterampilan-keterampilan yang dipandang perlu.
 - e. Fasilitas perguruan tinggi juga bisa menjadi solusi terhadap rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah agar putra daerah yang berkeinginan melanjutkan pendidikan selepas SMA atau sederajat tapi enggan meninggalkan kampung halaman bisa difasilitasi dengan adanya perguruan tinggi di kabupaten Bantaeng.
3. Usaha Bidang Ekonomi melalui :
- a. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja yang sebesar-besarnya serta pengembangan kapabilitas angkatan kerja dengan tingkat produktifitas yang tinggi.
 - b. Peningkatan investasi daerah dengan membuka ruang dan iklim usaha yang sehat bagi dunia usaha dan jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di daerah.

<https://bantaengkab.bps.go.id>

Tabel 1. Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2021

No	Komponen	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Umur Harapan Hidup (Tahun)	69,90	70,11	70,42	70,54	70,60
2.	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,99	12,01	12,03	12,04	12,05
3.	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,45	6,47	6,48	6,72	6,77
4.	Purchasing Power Parity (Daya Beli)	10.751	11.153	11.592	11.632	11.829
5.	Indeks Pendidikan	54,81	54,93	55,02	55,84	56,04
6.	Indeks Pengeluaran	72,35	73,47	74,65	74,76	75,27
7.	Indeks Kesehatan	76,77	77,09	77,57	77,75	77,85
IPM		67,27	67,76	68,30	68,73	68,99

Sumber: BPS Kabupaten Bantaeng

Tabel 2. Angka Harapan Hidup Kabupaten / Kota Se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Kode	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7301	Selayar	67,82	68,03	68,34	68,46	68,52
7302	Bulukumba	66,96	67,27	67,69	67,92	68,10
7303	Bantaeng	69,90	70,11	70,42	70,54	70,60
7304	Jeneponto	65,65	65,89	66,24	66,39	66,49
7305	Takalar	66,38	66,64	67,01	67,18	67,30
7306	Gowa	69,95	70,11	70,37	70,43	70,45
7307	Sinjai	66,61	66,83	67,17	67,30	67,38
7308	Maros	68,60	68,74	68,98	69,02	69,04
7309	Pangkajene dan Kepulauan	65,86	66,12	66,49	66,66	66,78
7310	Barru	68,30	68,60	68,91	69,02	69,07
7311	Bone	66,22	66,50	66,88	67,07	67,21
7312	Soppeng	68,72	69,02	69,43	69,65	69,81
7313	Wajo	66,52	66,79	67,17	67,35	67,48
7314	Sidenreng Rappang	68,82	69,15	69,59	69,83	70,01
7315	Pinrang	68,68	68,98	69,39	69,61	69,77
7316	Enrekang	70,38	70,55	70,83	70,91	70,93
7317	Luwu	69,60	69,84	70,19	70,34	70,44
7318	Tana Toraja	72,56	72,80	73,15	73,30	73,40
7322	Luwu Utara	67,61	67,90	68,31	68,51	68,67
7325	Luwu Timur	69,79	70,03	70,38	70,53	70,63
7326	Toraja Utara	72,94	73,09	73,35	73,39	73,41
7371	Kota Makassar	71,51	71,70	72,00	72,09	72,13
7372	Kota Pare-Pare	70,69	70,88	71,18	71,27	71,31
7373	Kota Palopo	70,30	70,49	70,79	70,88	70,92
7300	Sulawesi Selatan	69,84	70,08	70,43	70,57	70,66

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 3. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten / Kota Se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Kode	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7301	Selayar	12,45	12,46	12,48	12,65	12,66
7302	Bulukumba	12,65	12,79	12,91	13,17	13,41
7303	Bantaeng	11,99	12,01	12,03	12,04	12,05
7304	Jeneponto	11,93	11,95	11,97	11,98	12,10
7305	Takalar	12,21	12,22	12,25	12,41	12,42
7306	Gowa	13,04	13,29	13,48	13,64	13,65
7307	Sinjai	12,84	12,85	12,87	13,05	13,06
7308	Maros	12,97	12,99	13,02	13,04	13,16
7309	Pangkajene dan Kepulauan	12,40	12,41	12,51	12,76	12,77
7310	Barru	13,55	13,56	13,57	13,58	13,59
7311	Bone	12,43	12,67	12,80	12,88	12,98
7312	Soppeng	12,33	12,57	12,73	12,90	13,05
7313	Wajo	13,09	13,11	13,13	13,14	13,15
7314	Sidenreng Rappang	12,90	12,91	12,93	12,94	12,95
7315	Pinrang	13,19	13,20	13,22	13,23	13,24
7316	Enrekang	13,66	13,68	13,69	13,70	13,71
7317	Luwu	13,28	13,30	13,32	13,33	13,39
7318	Tana Toraja	13,25	13,50	13,58	13,80	13,86
7322	Luwu Utara	12,38	12,39	12,42	12,43	12,57
7325	Luwu Timur	12,79	12,81	12,82	12,83	12,84
7326	Toraja Utara	13,34	13,35	13,37	13,38	13,39
7371	Kota Makassar	15,18	15,55	15,56	15,57	15,58
7372	Kota Pare-Pare	14,46	14,47	14,49	14,50	14,51
7373	Kota Palopo	15,05	15,06	15,07	15,08	15,09
7300	Sulawesi Selatan	13,28	13,34	13,36	13,45	13,52

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 4. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten / Kota Se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Kode	Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7301	Selayar	7,18	7,40	7,63	7.88	8.08
7302	Bulukumba	7,16	7,34	7,43	7.67	7.82
7303	Bantaeng	6,45	6,47	6,48	6.72	6.77
7304	Jeneponto	5,98	6,21	6,48	6.59	6.60
7305	Takalar	6,77	6,91	7,18	7.29	7.49
7306	Gowa	7,74	7,75	7,97	8.19	8.20
7307	Sinjai	7,28	7,29	7,48	7.75	7.78
7308	Maros	7,42	7,43	7,46	7.73	8.01
7309	Pangkajene dan Kepulauan	7,48	7,49	7,60	7.66	7.92
7310	Barru	7,85	7,86	7,96	8.23	8.24
7311	Bone	6,77	6,97	6,98	7.15	7.23
7312	Soppeng	7,42	7,63	7,74	7.81	7.82
7313	Wajo	6,78	6,79	6,80	6.81	7.05
7314	Sidenreng Rappang	7,52	7,79	7,83	7.84	7.94
7315	Pinrang	7,54	7,84	7,85	7.86	7.87
7316	Enrekang	8,43	8,68	8,89	8.90	8.91
7317	Luwu	7,89	7,97	8,15	8.24	8.35
7318	Tana Toraja	7,93	7,94	8,02	8.26	8.51
7322	Luwu Utara	7,52	7,53	7,78	7.79	7.86
7325	Luwu Timur	8,20	8,45	8,54	8.80	8.81
7326	Toraja Utara	7,73	7,76	7,92	7.96	8.25
7371	Kota Makassar	11,08	11,09	11,20	11.21	11.43
7372	Kota Pare-Pare	10,09	10,29	10,30	10.45	10.65
7373	Kota Palopo	10,33	10,51	10,75	10.76	10.94
7300	Sulawesi Selatan	7,95	8,02	8,26	8.38	8.46

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 5. Pengeluaran Per Kapita (PPP) Kabupaten / Kota Se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Kode	Kabupaten/Kota	Pengeluaran Per Kapita (Ribuan Rupiah PPP)				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7301	Selayar	8.436	8.666	9.028	8.970	9.060
7302	Bulukumba	10.217	10.331	10.480	10.513	10.632
7303	Bantaeng	10.751	11.153	11.592	11.632	11.829
7304	Jeneponto	8.747	8.957	9.078	9.114	9.215
7305	Takalar	9.845	10.134	10.474	10.454	10.543
7306	Gowa	9.009	9.179	9.369	9.394	9.504
7307	Sinjai	8.816	9.098	9.465	9.439	9.505
7308	Maros	10.121	10.558	10.981	10.963	11.032
7309	Pangkajene dan Kepulauan	10.837	11.197	11.392	11.405	11.519
7310	Barru	10.285	10.622	10.911	10.923	11.017
7311	Bone	8.470	8.686	8.954	8.963	9.030
7312	Soppeng	9.035	9.291	9.444	9.483	9.558
7313	Wajo	11.770	12.057	12.399	12.386	12.505
7314	Sidenreng Rappang	11.523	11.834	12.039	12.073	12.201
7315	Pinrang	11.279	11.508	11.828	11.844	11.956
7316	Enrekang	10.359	10.683	10.800	10.844	10.973
7317	Luwu	9.381	9.705	10.085	10.014	10.116
7318	Tana Toraja	6.801	7.087	7.253	7.217	7.434
7322	Luwu Utara	11.101	11.429	11.583	11.562	11.736
7325	Luwu Timur	12.030	12.346	12.802	12.814	12.886
7326	Toraja Utara	7.457	7.783	8.083	8.097	8.134
7371	Kota Makassar	16.367	16.597	16.989	16.873	17.097
7372	Kota Pare-Pare	13.078	13.303	13.648	13.663	13.786
7373	Kota Palopo	12.319	12.662	12.986	12.995	13.117
7300	Sulawesi Selatan	10.489	10.814	11.118	11.079	11.184

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota Se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Kode	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7301	Selayar	65,39	66,04	66,91	67,38	67,76
7302	Bulukumba	67,08	67,70	68,28	68,99	69,62
7303	Bantaeng	67,27	67,76	68,30	68,73	68,99
7304	Jeneponto	62,67	63,33	64,00	64,26	64,56
7305	Takalar	65,48	66,07	66,94	67,31	67,72
7306	Gowa	68,33	68,87	69,66	70,14	70,29
7307	Sinjai	65,80	66,24	67,05	67,60	67,75
7308	Maros	68,42	68,94	69,50	69,86	70,41
7309	Pangkajene dan Kepulauan	67,25	67,71	68,29	68,72	69,21
7310	Barru	69,56	70,05	70,60	71,00	71,13
7311	Bone	64,16	65,04	65,67	66,06	66,40
7312	Soppeng	66,67	67,60	68,26	68,67	68,99
7313	Wajo	68,18	68,57	69,05	69,15	69,62
7314	Sidenreng Rappang	69,84	70,60	71,05	71,21	71,54
7315	Pinrang	69,90	70,62	71,12	71,26	71,45
7316	Enrekang	71,44	72,15	72,66	72,76	72,91
7317	Luwu	69,02	69,60	70,39	70,51	70,85
7318	Tana Toraja	66,82	67,66	68,25	68,75	69,49
7322	Luwu Utara	68,35	68,79	69,46	69,57	70,02
7325	Luwu Timur	71,46	72,16	72,80	73,22	73,34
7326	Toraja Utara	67,90	68,49	69,23	69,33	69,75
7371	Kota Makassar	81,13	81,73	82,25	82,25	82,66
7372	Kota Pare-Pare	76,68	77,19	77,62	77,86	78,21
7373	Kota Palopo	76,71	77,30	77,98	78,06	78,38
7300	Sulawesi Selatan	70,34	70,90	71,66	71,93	72,24

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 7. Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota Se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Kode	Kabupaten/Kota	Peringkat Indeks Pembangunan Manusia				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7301	Selayar	22	22	22	21	20
7302	Bulukumba	17	17	17	15	15
7303	Bantaeng	15	15	15	17	18
7304	Jeneponto	24	24	24	24	24
7305	Takalar	21	21	21	22	22
7306	Gowa	12	11	10	10	11
7307	Sinjai	20	20	20	20	21
7308	Maros	10	10	11	11	10
7309	Pangkajene dan Kepulauan	16	16	16	18	17
7310	Barru	8	8	8	8	8
7311	Bone	23	23	23	23	23
7312	Soppeng	19	19	18	19	19
7313	Wajo	13	13	14	14	14
7314	Sidenreng Rappang	7	7	7	7	6
7315	Pinrang	6	6	6	6	7
7316	Enrekang	5	5	5	5	5
7317	Luwu	9	9	9	9	9
7318	Tana Toraja	18	18	19	16	16
7322	Luwu Utara	11	12	12	12	12
7325	Luwu Timur	4	4	4	4	4
7326	Toraja Utara	14	14	13	13	13
7371	Kota Makassar	1	1	1	1	1
7372	Kota Pare-Pare	3	3	3	3	3
7373	Kota Palopo	2	2	2	2	2
7300	Sulawesi Selatan	14	14	14	12	11

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

<https://bantaengkab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANTAENG
Jl. Merpati No. 19 Bantaeng 92411
Telp.(0413)21072 Email : bps7303@bps.go.id
Website : <https://bantaengkab.bps.go.id>